

**AUDIT PENERIMAAN KAS UNTUK MENILAI DAN MENGEVALUASI ADANYA
SALAH SAJI YANG MATERIAL PADA LAPORAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kediri)**

M. Kharis M.K

Jurusan Akuntansi Fak. Ekonomi Universiats Islam Kediri

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri (dalam hal ini kantor BPKAD) yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No.1 Kediri. Penelitian ini dilatarbelakangi tentang tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. Serta pemeriksaan atau audit yang diterapkan pada pemerintah daerah sebagai bukti adanya transparansi di dalam pemerintah daerah itu sendiri. Hal ini merupakan kondisi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah sehingga audit penerimaan kas dapat digunakan untuk menilai dan mengevaluasi adanya salah saji yang material pada laporan keuangan daerah.

Penulis melakukan analisa data dengan membandingkan antara penerimaan kas daerah pada periode Januari sampai dengan Mei tahun 2012 dengan penerimaan kas daerah pada tahun 2011. Dan mengetahui proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah serta proses audit atau pemeriksaannya.

Hasil penelitian dari perbandingan laporan penerimaan kas, dengan mengetahui proses penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan daerah diperoleh bahwa penerimaan kas daerah per Januari sampai dengan Mei tahun 2012 belum mencapai anggaran karena masih banyak ditemukan kekurangan dalam pencapaian target anggaran pada laporan keuangannya. Serta ditemukannya kesalahan dalam penyusunan penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berpengaruh terhadap terhambatnya penyusunan laporan keuangan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Sebaiknya Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD lebih teliti lagi dan bisa tepat waktu dalam menyusun laporan penerimaan kas SKPD supaya tidak terjadi kesalahan pada laporan keuangan di BPKAD. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan di BPKAD terjadi karena kurang lengkap dan kurang telitinya pejabat penatausahaan keuangan di SKPD.

PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. Akuntansi sektor publik memberikan informasi keuangan dari entitas-entitas yang tidak mencari laba.

Akuntansi pemerintahan menghususkan dalam pencatatan dan

pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Akuntan pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan Negara. Pengkhususan di bidang ini meliputi pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran negara, termasuk kesesuaiannya dengan UU yang berlaku.

Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Adanya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan daerah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Oleh karena itu sistem akuntansi menjadi suatu tuntutan sekaligus kebutuhan bagi tiap pemda.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Akuntansi pemeriksaa atau auditing merupakan suatu bidang kegiatan menyangkut pemeriksaa atas catatan-catatan akuntansi secara bebas. Akuntan publik melakukan pemeriksaa atau audit atas catatan-catatan yang mendukung laporan keuangan dan memberikan pendapatnya mengenai kelayakan dan kewajaran laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan disebut layak dan wajar apabila memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Kabupaten Kediri adalah wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang mempunyai banyak potensi ekonomi dari sektor pariwisata, pertanian, dan peternakan. Secara umum bahwa potensi-potensi ekonomi dari sektor pariwisata, pertanian, dan peternakan mempunyai dampak yang signifikan terhadap masyarakat di Kabupaten Kediri. Sehingga pemberdayaan masyarakat pada sektor tersebut nantinya akan mempunyai dampak positif terhadap kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik mengambil judul pembahasan: “Audit Penerimaan Kas Untuk Menilai Dan Mengevaluasi Adanya Salah Saji Yang Material Terhadap Laporan Keuangan Daerah” (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kediri).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana audit penerimaan kas dapat digunakan untuk menilai dan mengevaluasi adanya salah saji yang material dalam laporan keuangan daerah.

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : untuk mengetahui bagaimana audit penerimaan kas dapat digunakan untuk menilai dan mengevaluasi adanya salah saji yang material dalam laporan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada salah satu instansi pemerintah Kabupaten Kediri yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pemerintah daerah Kabupaten Kediri yang terletak di Jl. Sukarno Hatta no. 1 Kabupaten Kediri. Alasan memilih lokasi penelitian ini karena pemerintah daerah Kabupaten Kediri terbuka dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
2. Dokumentasi

Identifikasi Variabel

Berdasarkan judul “Audit Penerimaan Kas Untuk Menilai Dan Mengevaluasi Adanya Salah Saji Yang Material Terhadap Laporan Keuangan Daerah” (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Kediri). Maka penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu :

1. Audit Penerimaan Kas Daerah
2. Laporan Keuangan Daerah

Definisi Operasional Variabel

1. Audit Penerimaan Kas Daerah adalah pemeriksaa subyektif atas perputaran semua penerimaan rekening kas umum

daerah dengan tujuan untuk kewajaran dalam penyajian laporan keuangan daerah.

- Laporan Keuangan Daerah adalah informasi keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah yang terutama di tujukan bagi kepentingan pihak luar pemerintah daerah tersebut.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan metode deskriptif kualitatif. Data tersebut selanjutnya akan diteliti dan dianalisis dengan langkah sebagai berikut:

- Melakukan pemeriksaan terhadap pos-pos pendapatan asli daerah. Pos-pos Pendapatan daerah tersebut meliputi:
 - Pos pajak daerah.
 - Retribusi laba.
 - Bagian laba usaha daerah.
 - Dan lain-lain pendapatan asli daerah.
- Melakukan pemeriksaan terhadap dana perimbangan pusat dan daerah. Dana Perimbangan dari pusat dan daerah meliputi atas:
 - Bagi hasil pajak bukan pajak.
 - Dana alokasi umum.
 - Dana alokasi khusus.
 - Dan dana perimbangan dari pusat.
- Melakukan penilaian dan pengevaluasian terhadap laporan penerimaan kas daerah dan menyusun laporan audit penerimaan kas daerah yang berisi rekomendasi mengenai penerimaan kas daerah

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pos-Pos Pendapatan Asli Daerah

Pos Pajak Daerah

Jumlah Anggaran Pajak Tahun 2012 dan Realisasi Pajak per Januari sampai dengan

Pajak Daerah	Anggaran 2012 (Rp)	Realisasi 2012 (Rp)	Realisasi 2011 (Rp)
	29.909.566.000,00	12.781.541.080,80	32.784.017.440,93

Sumber: Diolah oleh peneliti

Mei Tahun 2012 serta Realisasi Pajak Tahun 2011

Realisasi Pajak Daerah per Januari sampai dengan Mei tahun 2012 sebesar Rp12.781.541.080,80 atau 42,73%

$$\left(\frac{12.781.541.080,80}{29.909.566.000,00} \times 100\% \right) \text{ dari anggaran.}$$

Realisasi Pajak Daerah per Januari sampai dengan Mei tahun 2012 turun 61,01%

$$\left(\left(\frac{12.781.541.080,80}{32.784.017.440,93} \times 100\% \right) - 100\% \right) \text{ dibanding}$$

ngkan dengan realisasi Pajak Daerah tahun 2011.

Restribusi Daerah

Jumlah Anggaran Retribusi Tahun 2012 dan Realisasi Retribusi per Januari sampai dengan Mei Tahun 2012 serta Realisasi Retribusi Tahun 2011

Retribusi Daerah	Anggaran 2012 (Rp)	Realisasi 2012 (Rp)	Realisasi 2011 (Rp)
	4.097.283.730,00	2.947.550.820,00	4.175.270.396,44

Sumber: Diolah oleh peneliti

Realisasi Retribusi Daerah per Januari sampai dengan Mei tahun 2012 sebesar Rp4.757.932.430,00 atau 31,99%

$$\left(\frac{4.757.932.430,00}{14.869.949.205,00} \times 100\% \right) \text{ dari anggaran.}$$

Realisasi Retribusi Daerah per Januari sampai dengan Mei tahun 2012 turun

66,66% $\left(\left(\frac{4.757.932.430,00}{14.273.202.910,05} \times 100\% \right) - 100\% \right)$ dibandingkan dengan realisasi Retribusi Daerah tahun 2011.

Bagian Laba Usaha Daerah

Jumlah Anggaran Bagian Laba Usaha Daerah Tahun 2012 dan Realisasi Anggaran Bagian Laba Usaha Daerah per Januari sampai dengan Mei Tahun 2012 serta Realisasi Bagian Laba Usaha Daerah Tahun 2011

Bagian Laba Usaha Daerah	Anggaran 2012 (Rp)	Realisasi 2012 (Rp)	Realisasi 2011 (Rp)
	14.869.949.205,00	4.757.932.430,00	14.273.202.910,05

Sumber: Diolah oleh peneliti

Realisasi hasil Bagian Laba Usaha Daerah per Januari sampai dengan Mei tahun 2012 sebesar Rp2.947.550.820,00 atau 71,94% $\left(\frac{2.947.550.820,00}{4.097.283.730,00} \times 100\% \right)$ dari anggaran. Realisasi Bagian Laba Usah Daerah per Januari sampai dengan Mei tahun 2012 turun sebesar 29.40% $\left(\left(\frac{2.947.550.820,00}{4.175.270.396,44} \times 100\% \right) - 100\% \right)$ dibandingkan dengan realisasi Bagian Laba Usaha Daerah tahun 2011.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Jumlah Anggaran Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2012 dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah per Januari sampai dengan Mei Tahun 2012 serta Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2011

Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran 2012 (Rp)	Realisasi 2012 (Rp)	Realisasi 2011 (Rp)
	34.175.112.437,00	15.164.769.280,00	45.588.146.941,96

Sumber: Diolah oleh peneliti

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per Januari sampai dengan Mei tahun 2012 sebesar Rp15.164.769.280,00

atau 44,37% $\left(\frac{15.164.769.280,00}{34.175.112.437,00} \times 100\% \right)$ dari anggaran. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per Januari sampai dengan Mei tahun 2012 turun sebesar 55,63% $\left(\left(\frac{15.164.769.280,00}{45.588.146.941,96} \times 100\% \right) - 100\% \right)$ dibandingkan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2011.

Melakukan Pemeriksaan Terhadap Dana Perimbangan dari Pusat dan Daerah

Bagi Hasil Pajak atau Bagi Hasil Bukan Pajak

Jumlah Anggaran Bagi Hasil Pajak Tahun 2012 dan Relisasi Bagi Hasil Pajak per Januari sampai dengan Mei Tahun 2012 serta Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2011

Dana Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2012 (Rp)	Realisasi 2012 (Rp)	Realisasi 2011 (Rp)
	81.267.067.604,43	21.702.723.620,00	95.300.377.956,00

Sumber: Diolah oleh peneliti

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak per Januari sampai dengan Mei tahun 2012 sebesar Rp21.702.723.620,00 atau 26,70% $\left(\frac{21.702.723.620,00}{81.267.067.604,43} \times 100\% \right)$ dari anggaran.

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak per Januari sampai dengan Mei tahun 2012 turun sebesar 77,23% $\left(\left(\frac{21.702.723.620,00}{95.300.377.956,00} \times 100\% \right) - 100\% \right)$ dibandingkan realisasi Bagi Hasil Pajak tahun 2011.

Jumlah Anggaran Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2012 dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak per Januari sampai dengan Mei Tahun 2012 serta Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2011

Dana Alokasi Khusus

Dana Bagi Hasil bukan Pajak	Anggaran 2012 (Rp)	Realisasi 2012 (Rp)	Realisasi 2011 (Rp)
	2.788.052.861,00	3.687.081.989,00	9.017.905.563,00

Sumber: Diolah oleh peneliti

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak atau Sumber Daya Alam per Januari sampai dengan Mei tahun 2012 sebesar Rp3.687.081.989,00 atau lebih 32,24% $(\frac{3.687.081.989,00}{2.788.052.861,00} \times 100\%)$ dari anggaran tahun 2012. Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak per Januari sampai dengan Mei tahun 2012 turun 59,11% $(\frac{3.687.081.989,00}{2.788.052.861,00} \times 100\%) - 100\%$ dibandingkan dengan realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak tahun 2011.

Dana Alokasi Umum

Jumlah Anggaran Dana Alokasi Umum Tahun 2012 dan Realisasi Dana Alokasi Umum per Januari sampai dengan Mei Tahun 2012 serta Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2011

Dana Alokasi Umum	Anggaran 2012 (Rp)	Realisasi 2012 (Rp)	Realisasi 2011 (Rp)
	925.532.895.000,00	385.638.705.000,00	750.225.450.000,00

Sumber: Diolah oleh peneliti

Realisasi Dana Alokasi Umum per Januari sampai dengan Mei tahun 2012 sebesar Rp385.638.705.000,00 atau 41,67% $(\frac{385.638.705.000,00}{925.532.895.000,00} \times 100\%)$ dari anggaran tahun 2012. Realisasi Dana Alokasi Umum per Januari sampai dengan Mei tahun 2012 turun 48,59% $(\frac{385.638.705.000,00}{750.225.450.000,00} \times 100\%) - 100\%$ dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Umum tahun 2011.

Jumlah Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun 2012 dan Realisasi Dana Alokasi Khusus per Januari sampai dengan Mei Tahun 2012 serta Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2011

Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2012 (Rp)	Realisasi 2012 (Rp)	Realisasi 2011 (Rp)
	102.056.870.000,00	30.617.061.000,00	47.492.900.000,00

Sumber: Diolah oleh peneliti

Realisasi Dana Alokasi Khusus per Januari sampai dengan Mei tahun 2012 sebesar Rp30.617.061.000,00 atau 30% $(\frac{30.617.061.000,00}{102.056.870.000,00} \times 100\%)$ dari anggaran tahun 2012. Realisasi Dana Alokasi Khusus per Januari sampai dengan Mei tahun 2012 turun 35,53% $(\frac{30.617.061.000,00}{47.492.900.000,00} \times 100\%) - 100\%$ dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Khusus tahun 2011.

Dana Perimbangan dari Pusat dan Daerah

Jumlah Anggaran Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun 2012 dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi per Januari sampai dengan Mei Tahun 2012 serta Realisasi Dana

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	Anggaran 2012 (Rp)	Realisasi 2012 (Rp)	Realisasi 2011 (Rp)
	68.170.363.274	26.226.953.548,00	81.848.498.365,00

Sumber: Diolah oleh peneliti

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun 2011 Relisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi per Januari sampai dengan Mei tahun 2012 sebesar Rp26.226.953.548,00 atau 38,47% $(\frac{26.226.953.548,00}{68.170.363.274,00} \times 100\%)$ dari anggaran tahun 2012. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi per Januari sampai dengan Mei tahun 2012 turun 67,96% $(\frac{26.226.953.548,00}{81.848.498.365,00} \times 100\%) - 100\%$ dibandingkan dengan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi tahun 2011.

Jumlah Anggaran Dana Penyesuaian Tahun 2012 dan Realisasi Dana Penyesuaian per Januari sampai dengan Mei Tahun 2012 serta Realisasi Dana Penyesuaian Tahun 2011

Dana Penyesuaian	Anggaran 2012 (Rp)	Realisasi 2012 (Rp)	Realisasi 2011 (Rp)
	223.566.464.000,00	70.656.224.750,00	209.877.676.800

Sumber: Diolah oleh peneliti

Relisasi Dana Penyesuaian per Januari sampai dengan Mei tahun 2012 sebesar Rp70.656.224.750,00 atau 31,60% $(\frac{70.656.224.750,00}{223.566.464.000,00} \times 100\%)$ dari anggaran tahun 2012. Realisasi Dana Penyesuaian per Januari sampai dengan Mei tahun 2012 turun 66,33% $(\frac{70.656.224.750,00}{209.877.676.800,00} \times 100\%) - 100\%$ dibandingkan dengan realisasi Dana Penyesuaian tahun 2011.

Jumlah Anggaran Bantuan Keuangan dari Provinsi Tahun 2012 dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi per Januari sampai dengan Mei Tahun 2012 serta Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi Tahun 2011

Bantuan Keuangan dari Provinsi	Anggaran 2012 (Rp)	Realisasi 2012 (Rp)	Realisasi 2011 (Rp)
	16.910.640.000,00	0,00	11.492.320.000,00

Sumber: Diolah oleh peneliti

Relisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi per Januari sampai dengan Mei tahun 2012 sebesar Rp0,00 atau 0% $(\frac{0,00}{16.910.640.000,00} \times 100\%)$ dari anggaran tahun 2012. Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi per Januari sampai dengan Mei tahun 2012 turun 100% $(\frac{0,00}{11.492.320.000,00} \times 100\%) - 100\%$ dibandingkan dengan realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi tahun 2011.

Jumlah Anggaran Penerimaan Lain-lain Tahun 2012 dan Realisasi Penerimaan Lain-lain per Januari sampai dengan Mei Tahun 2012 serta Realisasi Penerimaan Lain-lain Tahun 2011

Penerimaan Lain-lain	Anggaran 2012 (Rp)	Realisasi 2012 (Rp)	Realisasi 2011 (Rp)
	60.000.000,00	308.830.000,00	664.913.385,00

Sumber: Diolah oleh peneliti

Relisasi Penerimaan Lain-lain per Januari sampai dengan Mei tahun 2012 sebesar Rp30.617.061.000,00 atau lebih lima kali 514,72% $\left(\frac{308.830.000,00}{60.000.000,00} \times 100\%\right)$ dari anggaran tahun 2012. Realisasi Penerimaan Lain-lain per Januari sampai dengan Mei tahun 2012 turun 53,55% $\left(\left(\frac{308.830.000,00}{664.913.385,00} \times 100\%\right) - 100\%\right)$ dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Lain-lain tahun 2011.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- Dalam melakukan penyusunan laporan penerimaan kas daerah BPKAD sebagai badan pengelola keuangan dan aset di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Kediri telah melaksanakan fungsi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Standart Akuntansi Pemerintahan atau SAP.
- Masih terdapat kelemahan dalam melakukan penyusunan laporan penerimaan di SKPD, yaitu:
 - Ditemukan adanya kesalahan pada laporan penerimaan di SKPD.
 - Bendahara penerimaan pada SKPD yang kurang tepat waktu dalam penyusunan laporan penerimaan SKPD.
 - Kurangnya jumlah pegawai yang ahli dalam bidangnya.
- Dalam laporan penerimaan kas daerah Kabupaten Kediri masih terdapat banyak kekurangan atau tidak terpenuhinya anggaran yang ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri. Pada akun tertentu juga ditemukan belum ada pendapatan yang masuk dipenerimaan kas daerah Kabupaten Kediri. ini karena pemeriksaan dilakukan pada tahun berjalan periode Januari sampai dengan Mei tahun 2012. Pemenuhan target yang dianggarkan oleh Pemerintah

Kabupaten Kediri masih bisa tercapai dengan berakhirnya tahun berjalan, jadi masih ada kemungkinan tercapainya target anggaran pada tahun 2012.

Saran

- Pemerintah sebaiknya melakukan pemisahan jabatan dan fungsi pegawainya dengan jelas, supaya tidak terjadi kecurangan dan beban pegawai yang mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan daerah.
- Pemerintah Daerah sebaiknya melakukan perputaran jabatan secara berkala, sehingga dapat meminimalisir kecurangan yang dapat merugikan Pemerintah Daerah.
- sebaiknya pemerintah melakukan *mentoring* dan evaluasi pada pegawai yang menangani dan menyusun laporan penerimaan kas daerah, agar nantinya pegawai yang bersangkutan adalah pegawai yang ahli dibidangnya.
- Dalam melakukan penyusunan laporan penerimaan di SKPD sebaiknya bendahara penerimaan bisa lebih tepat waktu dalam menyusun laporan penerimaan SKPD.
- Kelengkapan dan bukti-bukti penerimaan pada SKPD sebaiknya lebih diperhatikan lagi oleh Pejabat Penata Usaha Keuangan di SKPD agar laporan penerimaannya tidak terhenti di Inspektorat karena kelengkapan dan bukti-bukti penrimaannya masih kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikoesoema, Soemitha. (2006), *Business Management*, (Online), <http://id.shvoong.com/business-management/accounting/2289998-tujuan-audit-kas/#ixzz25NASvgGZ>
- Baridwan, Zaki. (2004), *Intermediate Accounting*, Yogyakarta: BPFE.
- Bastian, Indra. (2007), *Audit Sektor Publik*, Edisi Kedua, Jakarta: Salemba Empat.

- Halim, Abdul. (2004), *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Kemendagri (2011), *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Mardiasmo (2009), *Akuntansi Sektor Publik*, (Online), <http://greenlover-digitalnotes.blogspot.com/2011/02/teknik-akuntansi-keuangan-sektor-publik.html>
- Mulyadi (2002), *Auditing Buku Dua*, Edisi Keenam, Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi (2001), *Sistem Informasi Akuntansi*, (Online), <http://tjiaieming.blogspot.com/2012/04/sistem-informasi-akuntansi-penerimaan.html>.
- Mursyidi (2009), *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nordiawan, Deddi; Putra, Iswahyudi Sondi; & Rahmawari, Mulidah. (2007), *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Salemba Empat.